

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Formula 4+1 merupakan representasi konkret dari diplomasi kemanusiaan Indonesia dalam merespons eskalasi konflik Rohingya di Myanmar. Dalam konteks ini, Indonesia memosisikan diri bukan hanya sebagai negara dengan kepentingan bilateral, tetapi sebagai aktor normatif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, stabilitas kawasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Melalui pendekatan diplomasi kemanusiaan, Indonesia berhasil merancang strategi yang mengintegrasikan prinsip non-intervensi ASEAN dengan urgensi kemanusiaan global. Formula 4+1 menjadi instrumen diplomasi yang menekankan pada stabilitas keamanan, perlindungan terhadap kelompok rentan, penghentian kekerasan, dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan. Poin tambahan dalam formula ini, yakni implementasi rekomendasi Komisi Penasihat Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan, memperkuat posisi Indonesia sebagai fasilitator yang tidak berpihak, namun tetap tegas dalam membela nilai kemanusiaan.

Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri memainkan peran strategis dalam memformulasikan diplomasi ini. Meski gender beliau sebagai perempuan menjadi simbol kemajuan representasi dalam diplomasi, keberhasilan Formula 4+1 lebih dipengaruhi oleh kapasitas teknis, pengalaman, serta posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan yang dijalankan bersifat struktural dan institusional, bukan hanya individual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Formula 4+1 merupakan wujud dari diplomasi kemanusiaan yang menekankan pada daya tarik normatif ketimbang tekanan koersif. Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk tetap menjaga prinsip non-intervensi sekaligus memenuhi kewajiban moral terhadap perlindungan hak asasi manusia. Keberhasilan diplomasi ini membuka ruang baru bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di kawasan, sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan global Indonesia sebagai aktor perdamaian dunia.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian ini, penulis memberikan saran praktis kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk memperkuat peran dan efektivitas diplomasi kemanusiaan melalui pendekatan yang lebih strategis, konsisten, dan berbasis nilai. Formula 4+1 yang telah menjadi salah satu inisiatif diplomatik Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif negara-negara kawasan dalam mendorong resolusi damai melalui jalur diplomasi. Namun demikian, implementasi kebijakan semacam ini perlu dilengkapi dengan kapasitas kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika geopolitik dan kompleksitas konflik multidimensi.

Dalam konteks diplomasi kemanusiaan, Indonesia disarankan untuk membangun sistem koordinasi kebijakan luar negeri yang lebih terstruktur dan responsif terhadap situasi-situasi kemanusiaan di kawasan, mencakup kebutuhan akan peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan diplomasi tidak hanya dari aspek retorika politik, tetapi dari sejauh mana akses terhadap bantuan kemanusiaan, repatriasi yang bermartabat, serta pembangunan inklusif benar-benar dapat diwujudkan. Dalam hal ini, kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), serta dengan aktor

non-negara seperti LSM dan akademisi, menjadi penting untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, diplomasi Indonesia perlu terus mengedepankan pendekatan *soft power* yang bersandar pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan perdamaian. Citra Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang moderat, demokratis, dan aktif di kancah internasional harus terus dimanfaatkan untuk mendorong perubahan kebijakan negara-negara mitra secara konstruktif dan tidak konfrontatif. Penggunaan *soft power* dalam diplomasi kemanusiaan memungkinkan Indonesia tampil sebagai jembatan dialog dan pelopor inisiatif yang bersifat solutif dan inklusif, tanpa mengabaikan norma-norma internasional.

Pada saat yang sama, perhatian terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dalam krisis Rohingya tetap harus menjadi bagian integral dari agenda kebijakan luar negeri. Meski penelitian ini tidak secara eksplisit membahas isu gender sebagai variabel utama, prinsip inklusivitas tetap menjadi elemen penting dalam diplomasi kemanusiaan. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun strategi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan pasca-konflik.

Dari sisi teoritis, penelitian ini membuka ruang penguatan atas pemahaman mengenai diplomasi kemanusiaan sebagai praktik yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga strategis dalam menghadapi krisis kontemporer. Dalam konteks Formula 4+1, nilai-nilai tersebut tercermin dalam komitmen Indonesia untuk mendorong penyelesaian damai tanpa melanggar prinsip non-intervensi ASEAN, sambil tetap menekankan pentingnya tanggung jawab moral terhadap tragedi kemanusiaan.

Penulis menyarankan agar kajian-kajian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana diplomasi kemanusiaan dapat diformulasikan sebagai strategi jangka panjang dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pendekatan ini juga dapat diperluas dengan mengkaji lebih sistematis integrasi antara diplomasi kemanusiaan, diplomasi preventif, dan *norm entrepreneurship* dalam sistem

multilateral. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang responsif terhadap krisis, tetapi juga mampu menjadi penggerak norma dan nilai dalam percaturan hubungan internasional kontemporer. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan awal dalam pengembangan kebijakan luar negeri yang lebih empatik, inklusif, dan transformatif di masa depan.